

DARI MODERASI MENUJU PERADABAN HARMONIS **Transformasi Masyarakat Moderat Menjadi Masyarakat Harmonis untuk** **Membangun Peradaban yang Berkeadaban**

¹Dr. Sjakir Lobud, S.Ag.M.Pd, ²Dr. Ubay Harun, S.Ag.M.Si

Datokarama State Islamic University, Palu, Indonesia

¹sjakirlobud@uindatokarama.ac.id, ²ubay@uindatokarama.ac.id

ABSTRAK

Masyarakat plural menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat keberagaman agama, budaya, etnis, kepentingan sosial, serta perkembangan teknologi digital yang dapat memperkuat interaksi sekaligus memunculkan polarisasi dan ketegangan sosial. Dalam konteks tersebut, moderasi tidak cukup dipahami sebagai sikap individual, tetapi perlu ditransformasikan menjadi kekuatan sosial dan kelembagaan untuk membangun masyarakat harmonis dan peradaban yang berkeadaban. Artikel ini bertujuan menganalisis transformasi moderasi menuju masyarakat harmonis serta merumuskan model konseptual pembangunan peradaban harmonis melalui perspektif administrasi publik dan pendidikan. Artikel menggunakan pendekatan konseptual dengan mengintegrasikan pemikiran tentang public value, social capital, collaborative governance, co-production pelayanan publik, pendidikan demokratis, kesadaran kritis, dan nilai-nilai Islam seperti wasathiyah, 'adl, amanah, tasamuh, dan islah. Hasil kajian menunjukkan bahwa moderasi memiliki fungsi strategis sebagai fondasi pembentukan modal sosial melalui penguatan dialog, penghormatan terhadap perbedaan, kepercayaan, dan kemampuan mengelola konflik secara konstruktif. Moderasi yang dipraktikkan secara konsisten dapat berkembang menjadi norma sosial, memperkuat kepercayaan, dan mendorong kolaborasi antarkelompok sehingga membentuk masyarakat harmonis. Selanjutnya, masyarakat harmonis dapat mendorong terbentuknya kelembagaan yang adil, inklusif, partisipatif, dan berkeadaban. Berdasarkan konstruksi tersebut, artikel menawarkan Model 3M: Moderasi, Masyarakat Harmonis, dan Peradaban Harmonis, yang secara operasional dapat dirumuskan melalui alur Moderasi → Kepercayaan → Kolaborasi → Masyarakat Harmonis → Kelembagaan Berkeadaban → Peradaban Harmonis. Pendidikan diposisikan sebagai infrastruktur sosial yang membentuk manusia moderat, memiliki kecakapan sosial, karakter, literasi pengetahuan, dan literasi digital, sedangkan administrasi publik berperan menyediakan ekosistem kelembagaan dan pelayanan publik yang adil serta inklusif. Dengan demikian, pembangunan peradaban harmonis merupakan proses transformasi berkelanjutan yang menghubungkan kualitas manusia, kohesi sosial, tata kelola kolaboratif, pendidikan, dan kelembagaan publik. Model ini menegaskan bahwa moderasi bukan tujuan akhir, melainkan titik awal perjalanan menuju masyarakat yang harmonis dan peradaban yang berkeadaban.

Kata kunci: moderasi, masyarakat harmonis, peradaban harmonis, collaborative governance, administrasi publik, pendidikan, Model 3M.

1. Pendahuluan

Masyarakat modern berkembang dalam lingkungan sosial yang semakin kompleks. Mobilitas manusia, perkembangan teknologi informasi, keterhubungan digital, serta keterbukaan ruang publik telah mempertemukan individu dan kelompok dengan latar belakang agama, budaya, etnis, pendidikan, kepentingan, dan orientasi sosial yang berbeda. Keberagaman tersebut pada satu sisi merupakan kekayaan sosial yang dapat menjadi sumber energi pembangunan, tetapi pada sisi lain dapat melahirkan ketegangan apabila tidak disertai kemampuan masyarakat dalam mengelola perbedaan secara konstruktif. Karena itu, tantangan pembangunan masyarakat dewasa ini tidak cukup dijawab melalui pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur, atau peningkatan kualitas pelayanan publik semata. Pembangunan juga membutuhkan kapasitas sosial dan moral masyarakat untuk hidup bersama dalam perbedaan.

Dalam konteks tersebut, moderasi menjadi konsep yang penting untuk dikembangkan. Moderasi bukan sekadar posisi berada di antara dua kutub ekstrem, melainkan sebuah orientasi berpikir dan bertindak yang menempatkan keseimbangan, keadilan, penghormatan terhadap manusia, serta kepentingan bersama sebagai dasar kehidupan sosial. Moderasi memungkinkan masyarakat mengembangkan sikap yang tidak mudah terjebak dalam fanatisme sempit, eksklusivisme, kekerasan simbolik, maupun penolakan terhadap kelompok yang berbeda.

Namun demikian, persoalan mendasar yang perlu dikembangkan adalah apakah moderasi berhenti sebagai sikap individual atau dapat ditransformasikan menjadi kekuatan kolektif dalam membangun kehidupan masyarakat. Jika moderasi hanya ditempatkan sebagai pengetahuan atau slogan, pengaruhnya terhadap kehidupan publik akan terbatas. Moderasi

harus bergerak dari wilayah kognitif menuju perilaku, dari perilaku individual menuju budaya sosial, dan dari budaya sosial menuju tata kehidupan bersama. Dengan demikian, moderasi perlu dipahami sebagai proses transformasi yang memiliki konsekuensi terhadap pendidikan, kebijakan publik, kelembagaan, pelayanan publik, dan hubungan sosial.

Dalam perspektif administrasi publik, perubahan sosial tersebut berkaitan erat dengan bagaimana negara dan masyarakat membangun tata kelola yang mampu menciptakan kehidupan bersama yang adil dan inklusif. Administrasi publik kontemporer tidak lagi semata-mata berbicara mengenai bagaimana pemerintah menjalankan fungsi administratif, tetapi juga bagaimana pemerintah bersama masyarakat menciptakan nilai publik. Moore melalui konsep public value menempatkan penciptaan nilai publik sebagai salah satu orientasi penting dalam pengelolaan sektor publik. Nilai publik lahir ketika kebijakan dan pelayanan pemerintah memberikan manfaat yang dianggap bermakna oleh masyarakat.

Dalam kerangka tersebut, masyarakat moderat dapat ditempatkan sebagai salah satu modal sosial bagi penciptaan public value. Pemerintahan akan lebih mudah membangun pelayanan yang inklusif apabila masyarakat memiliki kemampuan menerima perbedaan. Sebaliknya, kebijakan yang diskriminatif, pelayanan yang tidak adil, serta lemahnya kepercayaan terhadap institusi publik dapat menghambat terbentuknya masyarakat harmonis. Dengan kata lain, hubungan antara moderasi dan administrasi publik bersifat timbal balik. Masyarakat membutuhkan tata kelola publik yang adil untuk mengembangkan moderasi, sementara pemerintahan membutuhkan masyarakat yang moderat untuk membangun tata kelola yang stabil dan kolaboratif.

Di sinilah pendidikan memperoleh posisi strategis. Pendidikan merupakan instrumen sosial yang mampu membentuk pola pikir, karakter, kemampuan berinteraksi, serta orientasi kewargaan generasi masa depan.

Pendidikan tidak hanya menghasilkan individu yang memiliki kompetensi akademik, tetapi juga individu yang mampu hidup bersama dalam lingkungan yang plural. Dewey memandang pendidikan sebagai proses kehidupan sosial yang memungkinkan individu belajar melalui pengalaman. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai demokrasi, kerja sama, penghargaan terhadap perbedaan, dan tanggung jawab sosial tidak cukup diajarkan secara verbal, tetapi perlu dipraktikkan dalam kehidupan pendidikan.

Dengan demikian, pendidikan moderasi seharusnya tidak ditempatkan sebagai program tambahan yang terpisah dari proses pendidikan. Moderasi harus masuk ke dalam budaya kelembagaan pendidikan, proses pembelajaran, hubungan guru dan peserta didik, pengelolaan sekolah atau madrasah, serta interaksi antara lembaga pendidikan dan masyarakat. Sekolah dan madrasah dapat menjadi laboratorium sosial tempat peserta didik belajar mengelola perbedaan secara nyata.

Dari perspektif tersebut, artikel ini menawarkan gagasan transformasi yang dapat dirumuskan dalam model 3M: Moderasi, Masyarakat Harmonis, dan Peradaban Harmonis. Moderasi ditempatkan sebagai fondasi nilai dan orientasi perilaku; masyarakat harmonis merupakan kondisi sosial yang terbentuk melalui praktik interaksi yang inklusif; sedangkan peradaban harmonis merupakan capaian jangka panjang ketika nilai-nilai moderasi dan harmoni telah melembaga dalam kehidupan sosial, pemerintahan, pendidikan, ekonomi, budaya, dan kehidupan keagamaan.

Model tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan peradaban tidak dapat dilakukan secara instan. Peradaban harmonis merupakan hasil akumulasi dari proses pendidikan, pembentukan karakter, tata kelola pemerintahan, penguatan institusi sosial, pembangunan kepercayaan, dan praktik kolaborasi yang berlangsung secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pertanyaan pentingnya bukan hanya bagaimana membuat masyarakat

menjadi moderat, tetapi bagaimana memastikan bahwa moderasi tersebut menghasilkan hubungan sosial yang harmonis dan kemudian berkembang menjadi budaya peradaban yang berkeadaban.

2. Moderasi sebagai Fondasi Masyarakat Harmonis

Moderasi memiliki dimensi personal sekaligus sosial. Pada tingkat personal, moderasi berkaitan dengan kemampuan seseorang mengendalikan sikap, emosi, dan penilaian terhadap orang lain. Pada tingkat sosial, moderasi berkaitan dengan kemampuan kelompok dan komunitas mengelola kepentingan yang berbeda tanpa menghancurkan hubungan sosial. Pada tingkat kelembagaan, moderasi tercermin dalam kebijakan dan pelayanan yang tidak diskriminatif. Sementara pada tingkat kebudayaan, moderasi menjadi nilai bersama yang memungkinkan masyarakat memandang keberagaman sebagai bagian dari kehidupan bersama.

Konsepsi tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat moderat bukanlah masyarakat yang kehilangan identitas. Justru masyarakat moderat adalah masyarakat yang memiliki identitas kuat tetapi mampu menghargai keberadaan identitas lain. Moderasi tidak menuntut seseorang meninggalkan keyakinan, melainkan mendorong kemampuan membedakan antara keteguhan prinsip dengan sikap permusuhan terhadap pihak lain. Dalam kehidupan publik, kemampuan tersebut sangat penting karena masyarakat terdiri atas berbagai kelompok dengan kepentingan yang tidak selalu sama.

Pemikiran ini dapat dihubungkan dengan teori social capital Robert D. Putnam. Modal sosial dibangun melalui jaringan, norma, dan kepercayaan yang memungkinkan masyarakat melakukan tindakan bersama. Ketika masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi, biaya sosial untuk melakukan kerja sama menjadi lebih rendah. Sebaliknya, ketika masyarakat dipenuhi kecurigaan, prasangka, dan segregasi sosial, berbagai agenda pembangunan akan menghadapi hambatan karena setiap kelompok lebih mengutamakan kepentingan internalnya.

Moderasi dengan demikian dapat berfungsi sebagai mekanisme pembentukan modal sosial. Individu yang moderat lebih memiliki kemungkinan untuk berdialog, mendengarkan pihak lain, mencari titik temu, dan menerima keputusan bersama. Ketika perilaku tersebut dilakukan secara berulang, ia dapat berkembang menjadi norma sosial. Norma yang terus dipraktikkan kemudian dapat membentuk budaya masyarakat.

Di sinilah terjadi proses transformasi penting seperti pada alur narasi berikut ini :

Moderasi Individual → Interaksi Moderat → Norma Sosial → Kepercayaan → Masyarakat Harmonis.

Harmoni tidak berarti ketiadaan konflik. Masyarakat yang harmonis tetap dapat memiliki perbedaan pendapat, persaingan kepentingan, dan konflik sosial. Perbedaannya terletak pada cara konflik tersebut dikelola. Dalam masyarakat yang matang, konflik tidak selalu dianggap sebagai ancaman, tetapi dapat menjadi sumber pembelajaran dan koreksi sosial apabila diselesaikan melalui mekanisme yang adil. Dengan demikian, indikator masyarakat harmonis bukan masyarakat tanpa konflik, melainkan masyarakat yang memiliki kapasitas untuk menyelesaikan konflik tanpa menghancurkan kohesi sosial.

Perspektif ini sejalan dengan pemikiran Amartya Sen mengenai pentingnya kebebasan dan kemampuan manusia dalam menjalani kehidupan yang bernilai. Masyarakat yang harmonis harus memberikan ruang kepada warga untuk menjalankan kehidupan secara bermartabat, memperoleh kesempatan yang adil, dan berpartisipasi dalam keputusan yang memengaruhi kehidupannya. Harmoni yang dibangun melalui pemaksaan bukanlah harmoni yang autentik. Harmoni membutuhkan keadilan, kebebasan yang bertanggung jawab, dan pengakuan terhadap martabat manusia.

Oleh sebab itu, moderasi harus dikaitkan dengan keadilan sosial. Moderasi yang tidak menghasilkan keadilan akan kehilangan kekuatan transformatifnya. Masyarakat mungkin diajak untuk toleran, tetapi jika sebagian kelompok mengalami diskriminasi dalam pelayanan publik, pendidikan, kesempatan ekonomi, atau akses terhadap sumber daya, maka ketegangan sosial tetap akan muncul. Moderasi harus berjalan bersama prinsip keadilan agar masyarakat memiliki alasan yang kuat untuk mempercayai institusi publik.

Dalam administrasi publik, keadilan tersebut dapat diwujudkan melalui prinsip pelayanan publik yang setara. Pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan bahwa setiap warga memperoleh hak pelayanan tanpa membedakan latar belakang sosial dan identitas kelompoknya. Dengan demikian, moderasi tidak hanya menjadi tanggung jawab individu dan tokoh agama, tetapi juga menjadi bagian dari etika penyelenggaraan pemerintahan.

Governance yang moderat berarti pemerintahan yang mampu mengelola keberagaman secara adil. Kebijakan publik tidak boleh menjadi alat dominasi kelompok tertentu. Sebaliknya, kebijakan harus menjadi instrumen untuk membangun ruang bersama. Prinsip tersebut semakin relevan dalam masyarakat yang plural karena setiap keputusan pemerintah memiliki konsekuensi sosial terhadap kelompok yang berbeda.

Dalam konteks pendidikan, pembentukan masyarakat moderat dapat dilakukan melalui pengembangan civic disposition, yaitu kecenderungan karakter yang memungkinkan seseorang menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Pendidikan perlu menanamkan kemampuan mendengarkan, berdialog, bekerja sama, menyelesaikan masalah, menghargai perbedaan, dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Pendidikan karakter dengan demikian memiliki hubungan langsung dengan agenda pembangunan masyarakat harmonis.

Sekolah dan madrasah memiliki posisi strategis karena merupakan institusi yang mempertemukan individu dari berbagai latar belakang. Lingkungan pendidikan dapat menjadi ruang pembelajaran demokrasi dalam skala mikro. Peserta didik belajar bagaimana bekerja dalam kelompok, menghargai pendapat, menjalankan tanggung jawab, menyelesaikan perbedaan, dan menerima keputusan bersama. Pengalaman tersebut akan membentuk kebiasaan sosial yang kemudian dibawa ke kehidupan masyarakat.

Dalam perspektif manajemen pendidikan, budaya sekolah menjadi instrumen penting dalam membangun moderasi. Nilai moderasi tidak akan efektif apabila hanya terdapat dalam dokumen kurikulum tetapi tidak terlihat dalam perilaku warga sekolah. Kepala sekolah atau kepala madrasah, guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik harus menjadi aktor yang mempraktikkan nilai tersebut. Keteladanan kepemimpinan menjadi faktor penting karena peserta didik belajar bukan hanya dari apa yang dikatakan guru, tetapi juga dari apa yang dilakukan oleh seluruh komunitas pendidikan.

Dengan demikian, pendidikan moderasi harus bergerak dari teaching about moderation menuju learning moderation through practice. Peserta didik tidak cukup mengetahui definisi toleransi, tetapi harus mengalami proses bekerja sama dengan orang lain yang berbeda. Tidak cukup memahami konsep keadilan, tetapi harus melihat bahwa lingkungan pendidikan memberikan perlakuan yang adil. Tidak cukup berbicara tentang persaudaraan, tetapi harus merasakan bahwa sekolah merupakan ruang yang aman untuk semua.

Dalam konteks inilah pendidikan dapat menjadi mesin sosial pembentukan masyarakat harmonis. Pendidikan menghasilkan manusia yang bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kecakapan sosial dan moral. Kualitas tersebut sangat penting bagi administrasi publik

karena kualitas pemerintahan pada akhirnya sangat dipengaruhi oleh kualitas warga negara yang dilayaninya.

3. Masyarakat Harmonis sebagai Produk Governance Kolaboratif

Masyarakat harmonis tidak lahir hanya dari kebijakan pemerintah. Harmoni membutuhkan keterlibatan banyak aktor. Pemerintah memiliki kewenangan regulatif dan sumber daya publik, lembaga pendidikan memiliki fungsi pembentukan pengetahuan dan karakter, keluarga memiliki fungsi sosialisasi nilai, organisasi keagamaan memiliki kekuatan moral, organisasi masyarakat memiliki kapasitas mobilisasi sosial, dan warga memiliki pengalaman langsung dalam kehidupan komunitas.

Karena itu, pembangunan masyarakat harmonis membutuhkan paradigma collaborative governance. Ansell dan Gash menjelaskan bahwa tata kelola kolaboratif mempertemukan aktor pemerintah dan nonpemerintah dalam proses pengambilan keputusan bersama. Kolaborasi tidak sekadar koordinasi administratif, tetapi membutuhkan dialog, kepercayaan, komitmen, dan pemahaman terhadap kepentingan bersama.

Dalam konteks moderasi, kolaborasi dapat menjadi jembatan antara kelompok-kelompok sosial yang memiliki perbedaan. Pemerintah dapat menyediakan ruang dialog, lembaga pendidikan dapat mengembangkan program pembelajaran lintas kelompok, organisasi keagamaan dapat memperkuat pesan moral, dan masyarakat dapat mengembangkan kegiatan sosial bersama. Aktivitas bersama memiliki kekuatan lebih besar daripada sekadar kampanye karena memungkinkan masyarakat mengalami secara langsung manfaat hidup dalam keberagaman.

Di sinilah konsep *co-production* dalam pelayanan publik menjadi relevan. Warga tidak hanya menjadi penerima pelayanan, tetapi juga ikut menghasilkan kualitas pelayanan. Masyarakat yang moderat dapat menjadi mitra pemerintah dalam menjaga lingkungan, meningkatkan kualitas

pendidikan, mengembangkan kegiatan sosial, mencegah konflik, dan memperkuat solidaritas komunitas.

Keterlibatan masyarakat tersebut memperluas makna pelayanan publik. Pelayanan publik tidak hanya diukur dari kecepatan administrasi atau tersedianya fasilitas, tetapi juga dari kemampuan institusi publik membangun rasa keadilan, kepercayaan, keamanan sosial, dan kohesi masyarakat. Dengan demikian, kualitas pelayanan publik memiliki dimensi sosial dan moral.

Osborne melalui perkembangan pemikiran public service-dominant approach menunjukkan pentingnya melihat pelayanan publik sebagai proses penciptaan nilai bersama. Nilai tidak semata-mata diproduksi oleh organisasi pemerintah, tetapi muncul melalui interaksi antara penyelenggara dan pengguna layanan. Dalam konteks masyarakat harmonis, nilai publik berupa rasa aman, kepercayaan, persaudaraan, dan solidaritas juga merupakan hasil interaksi antara negara dan masyarakat. Konsekuensinya, pemerintah perlu mengembangkan desain kebijakan yang membuka ruang partisipasi. Kebijakan moderasi yang hanya bersifat top-down berpotensi kehilangan daya hidup di tingkat masyarakat. Sebaliknya, kebijakan yang dirancang melalui partisipasi warga akan lebih mudah diterima karena masyarakat merasa menjadi bagian dari proses pembentukan kebijakan.

4. Pendidikan sebagai Infrastruktur Sosial Peradaban

Jika administrasi publik menyediakan kerangka kelembagaan, maka pendidikan menyediakan manusia yang mampu menghidupkan kelembagaan tersebut. Karena itu, pendidikan dapat disebut sebagai infrastruktur sosial peradaban. Jalan, gedung, teknologi, dan fasilitas ekonomi merupakan infrastruktur fisik, sedangkan pendidikan membangun infrastruktur manusia yang menentukan bagaimana seluruh sumber daya tersebut digunakan.

Peradaban yang maju membutuhkan manusia yang memiliki pengetahuan sekaligus kebijaksanaan. Kemajuan teknologi tanpa etika dapat menghasilkan persoalan baru. Kemajuan ekonomi tanpa keadilan dapat memperlebar kesenjangan. Kemajuan politik tanpa kedewasaan warga dapat menghasilkan polarisasi. Oleh sebab itu, pembangunan peradaban harus mempertemukan kecerdasan, karakter, keadilan, dan tanggung jawab sosial.

Pendidikan memiliki fungsi strategis dalam proses tersebut. Paulo Freire memandang pendidikan sebagai proses pembentukan kesadaran kritis. Pendidikan tidak semestinya menjadikan peserta didik sebagai penerima informasi secara pasif, tetapi membantu mereka memahami realitas sosial dan mengambil posisi sebagai subjek yang mampu melakukan perubahan. Dalam konteks masyarakat harmonis, kesadaran kritis dibutuhkan agar peserta didik tidak mudah menerima prasangka, ujaran kebencian, stereotip, maupun informasi provokatif. Era digital semakin memperkuat kebutuhan tersebut. Media sosial memungkinkan informasi menyebar dalam waktu sangat cepat. Di satu sisi, teknologi membuka ruang dialog yang luas; di sisi lain, algoritma dan ekosistem informasi dapat memperkuat echo chamber, polarisasi, dan penyebaran informasi yang menyesatkan. Pendidikan moderasi karena itu harus mencakup literasi digital. Peserta didik perlu memiliki kemampuan memeriksa informasi, membedakan fakta dan opini, memahami konteks, serta menghindari penyebaran konten yang dapat merusak hubungan sosial.

Dengan demikian, masyarakat harmonis pada era digital membutuhkan tiga jenis literasi: literasi pengetahuan, literasi sosial, dan literasi digital. Literasi pengetahuan memungkinkan warga memahami persoalan secara rasional; literasi sosial memungkinkan warga berinteraksi secara empatik; sedangkan literasi digital memungkinkan warga menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Ketiga literasi tersebut menjadi modal penting bagi pembangunan peradaban. Peradaban modern

tidak hanya ditentukan oleh kemampuan masyarakat menggunakan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan mengendalikan teknologi agar tetap melayani kepentingan manusia.

5. Dari Masyarakat Harmonis Menuju Peradaban Berkeadaban

Masyarakat harmonis merupakan kondisi penting, tetapi belum menjadi titik akhir. Harmoni sosial harus berkembang menjadi nilai yang melembaga dalam sistem kehidupan. Ketika nilai keadilan, toleransi, gotong royong, penghormatan terhadap martabat manusia, dan tanggung jawab sosial tidak hanya dilakukan oleh individu tertentu tetapi telah menjadi kebiasaan kolektif dan norma kelembagaan, maka masyarakat mulai bergerak menuju peradaban.

Peradaban pada hakikatnya merupakan akumulasi dari pengetahuan, moralitas, kelembagaan, kebudayaan, dan praktik kehidupan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Karena itu, peradaban harmonis tidak dapat dibangun melalui kegiatan seremonial. Ia membutuhkan proses panjang yang melibatkan pendidikan, pemerintahan, keluarga, agama, ekonomi, kebudayaan, dan masyarakat sipil.

Dalam perspektif administrasi publik, peradaban harmonis membutuhkan institusi yang kuat tetapi tidak represif, birokrasi yang profesional tetapi tetap humanis, kebijakan yang efektif sekaligus berkeadilan, serta pelayanan publik yang menempatkan warga sebagai manusia yang memiliki martabat. Birokrasi tidak boleh hanya menjadi mesin administratif. Birokrasi harus menjadi institusi yang mampu menghadirkan keadilan dalam pengalaman sehari-hari masyarakat.

Konsep *good governance* memberikan fondasi penting melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, responsivitas, dan keadilan. Akan tetapi, dalam masyarakat plural, prinsip-prinsip tersebut perlu diperkuat dengan dimensi etika. Governance yang baik bukan hanya

governance yang bekerja secara efektif, tetapi governance yang bekerja untuk kebaikan bersama.

Dalam perspektif nilai Islam, pembangunan masyarakat harmonis memiliki hubungan erat dengan prinsip wasathiyah, 'adl, amanah, tasamuh, dan islah. Wasathiyah mengandung orientasi keseimbangan; 'adl menekankan keadilan; amanah menuntut tanggung jawab; tasamuh mengajarkan penghormatan terhadap perbedaan; sedangkan islah mengarahkan manusia pada perbaikan dan perdamaian. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi sumber etika publik yang memperkuat tata kelola masyarakat. Namun, penerapan nilai agama dalam ruang publik harus dilakukan secara substantif dan inklusif. Nilai agama tidak semestinya digunakan sebagai instrumen dominasi terhadap kelompok lain. Sebaliknya, nilai agama harus menjadi sumber moral yang mendorong kejujuran, keadilan, kasih sayang, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap sesama manusia.

Pada titik ini, masyarakat harmonis tidak berarti masyarakat yang seragam. Keseragaman bukan prasyarat harmoni. Justru harmoni memperoleh maknanya karena terdapat keberagaman. Seperti sebuah orkestra yang menghasilkan musik melalui berbagai instrumen, masyarakat dapat menghasilkan kehidupan sosial yang indah melalui berbagai identitas yang berinteraksi dalam aturan bersama. Yang diperlukan bukan menghapus perbedaan, melainkan membangun kemampuan mengelola perbedaan.

6. Model 3M: Moderasi, Masyarakat Harmonis, dan Peradaban Harmonis

Berdasarkan uraian tersebut, gagasan utama artikel ini dapat dikonstruksikan dalam sebuah model transformasi 3M.

Pertama, Moderasi sebagai Transformasi Nilai. Pada tahap ini terjadi perubahan pada cara berpikir, sikap, dan perilaku individu. Moderasi

menjadi fondasi moral yang mendorong keseimbangan, keadilan, keterbukaan, dan penghormatan terhadap perbedaan.

Kedua, Masyarakat Harmonis sebagai Transformasi Sosial. Nilai moderasi yang telah dipraktikkan secara berulang berkembang menjadi norma sosial. Kepercayaan meningkat, komunikasi antarkelompok terbuka, kerja sama berkembang, dan konflik dapat dikelola secara konstruktif. Pada tahap ini terbentuk masyarakat yang memiliki kapasitas sosial untuk hidup bersama.

Ketiga, Peradaban Harmonis sebagai Transformasi Kelembagaan dan Kebudayaan. Nilai moderasi dan harmoni mulai masuk ke dalam institusi publik, sistem pendidikan, kebijakan, budaya organisasi, praktik ekonomi, kehidupan keagamaan, dan kehidupan masyarakat. Pada tahap inilah harmoni berubah menjadi karakter peradaban.

Secara konseptual, hubungan ketiganya dapat dirumuskan sebagai:

MODERASI → KEPERCAYAAN → KOLABORASI → MASYARAKAT HARMONIS → KELEMBAGAAN BERKEADABAN → PERADABAN



HARMONIS.

Gambar 1 : Model Transformasi 3M

Model tersebut memperlihatkan bahwa terdapat mekanisme transformasi yang tidak boleh dilewati. Masyarakat tidak dapat langsung menuju peradaban harmonis tanpa membangun masyarakat harmonis. Masyarakat harmonis juga sulit diwujudkan tanpa membangun manusia

yang moderat. Karena itu, investasi pertama dalam pembangunan peradaban adalah investasi pada manusia.

7. Implikasi bagi Administrasi Publik dan Pendidikan

Model 3M memiliki sejumlah implikasi strategis bagi administrasi publik.

Pertama, pemerintah perlu memandang moderasi sebagai bagian dari pembangunan kapasitas masyarakat. Program moderasi tidak cukup ditempatkan dalam kegiatan keagamaan, tetapi perlu diintegrasikan dengan kebijakan pendidikan, pelayanan publik, pembangunan sosial, kepemudaan, kebudayaan, dan pemberdayaan masyarakat.

Kedua, pemerintah perlu mengembangkan indikator harmoni sosial. Selama ini keberhasilan pembangunan sering diukur melalui indikator ekonomi dan fisik. Ke depan, ukuran keberhasilan pembangunan perlu memperhatikan tingkat kepercayaan masyarakat, kualitas partisipasi, inklusivitas pelayanan, kapasitas kolaborasi, serta kemampuan komunitas menyelesaikan konflik.

Ketiga, birokrasi perlu memperkuat kompetensi sosial dan budaya aparatur. Aparatur yang bekerja di masyarakat plural membutuhkan kemampuan komunikasi lintas budaya, sensitivitas sosial, kemampuan mediasi, dan kecakapan membangun kolaborasi. Profesionalisme birokrasi tidak hanya berkaitan dengan kompetensi teknis, tetapi juga kemampuan memahami masyarakat yang dilayaninya.

Keempat, pendidikan perlu diarahkan pada pembentukan moderate citizen. Peserta didik harus dipersiapkan menjadi warga yang memiliki kemampuan akademik, karakter, literasi digital, kecakapan sosial, dan tanggung jawab publik. Kurikulum, budaya sekolah, kepemimpinan pendidikan, dan kegiatan ekstrakurikuler harus diarahkan pada pengalaman hidup bersama dalam keberagaman.

Kelima, perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai pusat produksi pengetahuan dan inovasi sosial. Perguruan tinggi dapat melakukan penelitian tentang indeks harmoni masyarakat, mengembangkan model pendidikan moderasi, membangun laboratorium sosial, serta menjadi mediator antara pemerintah dan masyarakat.

Dengan demikian, administrasi publik dan pendidikan tidak berjalan sendiri-sendiri. Administrasi publik membangun ekosistem kelembagaan yang adil, sedangkan pendidikan membangun kapasitas manusia yang mampu menghidupkan ekosistem tersebut. Keduanya bertemu pada satu tujuan: membangun masyarakat yang mampu menciptakan kehidupan bersama secara damai, adil, produktif, dan berkeadaban.

8. Penutup: Moderasi sebagai Jalan Peradaban

Pada akhirnya, moderasi harus ditempatkan sebagai proses, bukan tujuan akhir. Moderasi menjadi bermakna ketika ia mampu mengubah cara manusia memandang perbedaan, mengelola konflik, membangun kepercayaan, dan bekerja bersama. Dari proses tersebut lahirlah masyarakat harmonis. Selanjutnya, apabila harmoni telah melembaga dalam pendidikan, pemerintahan, kebudayaan, kehidupan ekonomi, dan kehidupan sosial, maka masyarakat mulai membangun peradaban yang harmonis.

Dengan demikian, Dari Moderasi Menuju Peradaban Harmonis bukan sekadar gagasan normatif, tetapi sebuah konstruksi transformasi sosial yang dapat dibaca melalui perspektif administrasi publik dan pendidikan. Moderasi merupakan fondasi nilai; masyarakat harmonis merupakan hasil proses sosial; sedangkan peradaban harmonis merupakan capaian kelembagaan dan kebudayaan.

Kekuatan utama model ini terletak pada hubungan antara manusia, masyarakat, dan institusi. Manusia yang moderat membangun interaksi yang sehat. Interaksi yang sehat melahirkan kepercayaan. Kepercayaan

memungkinkan kolaborasi. Kolaborasi memperkuat masyarakat harmonis. Masyarakat harmonis kemudian mendorong terbentuknya institusi yang adil dan inklusif. Institusi yang berkeadaban bersama masyarakat yang matang menjadi fondasi bagi lahirnya peradaban harmonis. Karena itu, membangun peradaban harmonis sesungguhnya dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana: cara manusia memperlakukan manusia lainnya. Dari sikap yang moderat lahir penghormatan. Dari penghormatan lahir kepercayaan. Dari kepercayaan lahir kerja sama. Dari kerja sama lahir harmoni. Dan dari harmoni yang terus dipelihara melalui pendidikan, pemerintahan, kebudayaan, dan kehidupan sosial, lahirlah peradaban yang berkeadaban.

Inilah makna terdalam dari gagasan 3M: Moderasi, Masyarakat Harmonis, dan Peradaban Harmonis. Moderasi bukan garis akhir pembangunan sosial, melainkan titik awal perjalanan peradaban. Masyarakat harmonis bukan sekadar kondisi sosial yang damai, melainkan ruang tempat nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebersamaan dipraktikkan. Sedangkan peradaban harmonis merupakan puncak transformasi ketika nilai-nilai tersebut telah menjadi budaya, norma, institusi, dan karakter kehidupan bersama.

Dengan perspektif tersebut, agenda pembangunan tidak lagi semata-mata bertanya tentang seberapa tinggi pertumbuhan ekonomi, seberapa cepat pelayanan publik, atau seberapa maju teknologi. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: manusia seperti apa yang sedang kita bangun, masyarakat seperti apa yang sedang kita bentuk, dan peradaban seperti apa yang ingin kita wariskan kepada generasi berikutnya? Jawabannya harus diarahkan pada pembangunan manusia yang moderat, masyarakat yang harmonis, dan peradaban yang berkeadaban. Sebab, kemajuan yang kehilangan harmoni akan melahirkan ketegangan, sementara harmoni tanpa keadilan akan melahirkan kepalsuan. Peradaban yang benar-benar maju adalah peradaban yang mampu memadukan kemajuan dengan moralitas, keberagaman dengan

persatuan, kebebasan dengan tanggung jawab, serta pembangunan dengan kemanusiaan.

Daftar Pustaka

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Banks, J. A. (2008). Diversity, group identity, and citizenship education in a global age. *Educational Researcher*, 37(3), 129–139.
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. Dalam J. G. Richardson (Ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (pp. 241–258). New York: Greenwood.
- Dewey, J. (1916). *Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education*. New York: Macmillan.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Continuum.
- Habermas, J. (1984). *The Theory of Communicative Action: Volume 1, Reason and the Rationalization of Society*. Boston: Beacon Press.
- Karena artikel Prof. membawa konsep moderasi → masyarakat harmonis → peradaban harmonis, saya sarankan daftar pustaka tidak hanya berhenti pada teori administrasi publik. Tambahkan beberapa sumber berikut agar fondasi konseptualnya lebih kuat:
- Moore, M. H. (1995). *Creating Public Value: Strategic Management in Government*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Nussbaum, M. C. (2010). *Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Osborne, S. P., Radnor, Z., & Nasi, G. (2013). A new theory for public service management? Toward a public service-dominant approach. *The American Review of Public Administration*, 43(2), 135–158.

MUJAHADAH

JURNAL ILMU MULTIDISIPLIN

Volume 1 Nomor 8 September 2026

P-ISSN: xxxx-xxxx E-ISSN: xxxx-xxxx

- Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster.
- Rawls, J. (1999). *A Theory of Justice* (Rev. ed.). Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. New York: Alfred A. Knopf.
- Sumber tambahan yang sangat saya sarankan untuk memperkuat artikel UNESCO. (2021). *Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education*. Paris: UNESCO.
- United Nations Development Programme (UNDP). (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. New York: United Nations Development Programme.